

KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG

Jl. Jakarta Nomor 42-44 Telp. (022) 7103531-7103485

BANDUNG

Nomor : B- 1119 /O.2.10/Cpl.2/04/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Proposal Hibah
Pemkot Tahun Anggaran 2020.

Bandung, 26 April 2019

**KEPADA YTH.
WALIKOTA BANDUNG
DI -
BANDUNG**

Sehubungan dengan meningkatnya beban kerja dan mobilitas untuk mendukung program pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung, serta Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bersama ini disampaikan Proposal Permohonan Hibah berupa kendaraan dinas, peralatan elektronik dan meubelair, sebagaimana Proposal terlampir.

Demikian Surat Permohonan ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG



RUDY IRMAWAN, SH., MH

Jaksa Utama Pratama NIP. 19661206 199310 1 001

TEMBUSAN :

1. Yth. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT;
2. Yth. WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT;
3. Yth. ASISTEN BIDANG PEMBINAAN KEJATI JAWA BARAT;
4. Yth. ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJATI JAWA BARAT;
5. Yth. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG;
6. Yth. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG.
7. A R S I P.

KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG
 Jl. Jakarta Nomor 42-44 Telp. (022) 7103231-7103482
B A N D U N G

Nomor : Sifat : Lampiran : Perihal :	8-10/2019/02.10/Cp.2/04/2019 Bissa - Permohonan Proposal Hibah Pemkot Tahun Anggaran 2020	Bandung, 24 April 2019 KEPADA YTH. WALIKOTA BANDUNG DI - B A N D U N G
---	---	---

Sehubungan dengan meningkatnya peran kerja dan fasilitas untuk mendukung program pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung, serta Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bersama ini disampaikan Proposal Perencanaan Hibah berupa kendaraan dinas, peralatan elektronik dan meubelir, sebagaimana Proposal terlampir.

Demikian Surat Perencanaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG



W. IRMAWAN, SH., MH.

Jaksa Utama Pertama NIP. 19661206 199310 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Jawa Barat;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Jawa Barat;
5. Yth. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

PROPOSAL
PERMOHONAN HIBAH
KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG
KEPADA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2020
(KENDARAAN DINAS, PERALATAN ELEKTRONIK, MEBEULAIR)



KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG
2019

PROPOSAL
RENCANA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG T.A. 2020
(KENDARAAN DINAS, PERALATAN ELEKTRONIK DAN MEBEULAIR)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semangat reformasi diberbagai aspek kehidupan di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kota Bandung turut berbenah diri dengan meluncurkan Program Percepatan Pembaruan Kejaksaan, program ini lebih dikenal dengan QUICK WINS meliputi aspek pembaruan organisasi dan tata kerja Kejaksaan dan sumber daya manusia.

Program percepatan (*quick wins*) merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam perjalanannya sampai dengan tahun 2019 ini Kejaksaan Negeri Kota Bandung terus melakukan pembenahan, dengan tujuan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (*public trust building*) terhadap Kejaksaan, karena itu program yang dipilih adalah program yang memiliki daya tarik masyarakat yang terkait dengan perbaikan dalam penegakan hukum yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dengan mengedepankan profesionalisme, proporsional serta integritas moral. Hasil perubahan dalam program percepatan ini diharapkan dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kejaksaan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparaturnya Kejaksaan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan adalah pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) untuk satker-satker yang ditetapkan oleh Kejaksaan RI sebagai pilot project.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah meliputi 6 (enam) area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan